



**LEMBARAN KALURAHAN NGLANGGERAN
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 5

Tahun 2024

**PERATURAN KALURAHAN NGLANGGERAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLANGGERAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Nglanggeran Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Nglanggeran (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 3 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLANGGERAN

dan

LURAH NGLANGGERAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.716.529.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.791.475.099,00
Surplus/Defisit	Rp	(74.945.399,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	174.945.399,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	74.945.399,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglanggeran.

Ditetapkan di : Nglanggeran
Pada tanggal : 30 Desember 2024
Lurah,

ttd

WIDADA

Diundangkan di : Nglanggeran
Pada tanggal : 30 Desember 2024
Carik

ttd

RUSMIYATI
LEMBARAN KALURAHAN NGLANGGERAN NOMOR 5 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGLANGGERAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.720.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.597.459.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.350.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.716.529.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	699.764.472,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.407.118.917,00	
5.3.	Belanja Modal	575.318.810,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.272.900,00	
	JUMLAH BELANJA	2.791.475.099,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74.945.399,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	174.945.399,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	174.945.399,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	74.945.399,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nglanggeran, 30 December 2024

Lurah

WIDADA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLANGGERAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.720.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.597.459.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.350.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.716.529.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.097.103.749,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	862.105.439,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	562.321.500,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	562.321.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.428.032,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.428.032,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	93.332.507,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.332.507,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.040.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.819.760,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.819.760,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.148.700,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.148.700,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.700.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	8.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000,00	ADD, DLL, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.700.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	60.347.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.625.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.625.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	200.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	47.522.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.522.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	78.201.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.725.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.725.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.900.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.900.000,00	ADD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.756.000,00	PAD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.756.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	53.920.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.920.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	1.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.000.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	81.750.310,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	81.225.000,00	PAD, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.225.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	25.310,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	25.310,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.019.687.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	108.093.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	30.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	15.300.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	62.493.500,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	62.243.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	228.242.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	167.612.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.612.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.860.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.790.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.790.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	10.900.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	9.480.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	378.482.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	120.542.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	119.692.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	2.940.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.644.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	172.356.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	80.000.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	498.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	79.502.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	262.830.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	262.830.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.830.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.040.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.040.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	36.000.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	36.000.000,00	DDS
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>462.923.950,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.020.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.190.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	9.830.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.330.000,00	
3.1.90	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	406.500.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	400.000.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.500.000,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	75.500.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	1.500.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	5.000.000,00	DLL
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.040.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke c/Kab/Kota	3.500.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.350.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.150.000,00	PAD, PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	7.040.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.363.950,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	10.628.950,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.628.950,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.335.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.335.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.300.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.100.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.4.96	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>102.487.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	59.500.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	36.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	23.500.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.745.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.745.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.745.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.552.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	28.552.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.552.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.690.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7.690.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.690.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>109.272.900,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.072.900,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	21.072.900,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.072.900,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.400.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.400.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.791.475.099,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(74.945.399,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	174.945.399,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	74.945.399,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nglanggeran, 30 December 2024

Lurah

WIDADA